



LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2023
PEJABAT ESELON II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LUMAJANG

NAMA	: S U N A R D I, SP.MP
NIP	: NIP. 19651201 198903 1 012
PANGKAT	: PEMBINA
GOLONGAN	: IV/a
JABATAN	: Plt. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB I

PENDAHULUAN

A. ASPEK STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut.

A.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Kedudukan

- Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A.2 Tugas Pokok

- Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- mengikuti proses penyusunan Perda serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat Negara dan tamu negara;
- pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; dan

- pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.3 Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

Satpol PP mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danperlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, danperlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat;
- Penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur, dan perlindungan masyarakat ;
- Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

A.4 Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya sedapat mungkin mengedepankan pendekatan persuasif, dan menggunakan pendekatan represif/upaya paksa apabila diperlukan sesuai kondisi dan kebutuhan dilapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

A.5 Kerjasama dan Koordinasi

- Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya.
- Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian dan/atau instansi vertikal lainnya, bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- Kerjasama sebagaimana, didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

B. ISU STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum serta serta Perlindungan Masyarakat , antara lain :

1. Belum adanya relawan petugas penanganan kebakaran
2. Minimnya Sarana dan prasarana terkait penanganan kebakaran dan non kebakaran
3. belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran
4. Terbatasnya sumber daya manusia dalam penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
5. Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Perda/Perkada

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. TUJUAN

Tujuan adalah merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Dalam kerangka rencana strategik, tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan, dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang untuk masa tahun 2018 – 2023 menetapkan tujuan yaitu “ ***Meningkatnya Kepuasan Masyarakat***“

B. SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan – tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Oleh karena itu dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan sasaran adalah Meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kebijakan untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam prakteknya menghadapi rintangan. Tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta Pengelolaan Administrasi Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan bersih, dengan mengedepankan profesionalisme. Demikian juga pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah sangat diperlukan kecepatan, ketepatan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan kinerja Aparatur. Oleh karena itu masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya melaksanakan kajian dan analisa dalam merumuskan

kebijakan serta meningkatkan sumberdaya aparatur sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dengan mengedepankan pelayanan Pemerintahan dan tak kalah pentingnya pelayanan publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan.

Ada beberapa masalah utama yang dapat menghambat keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, terbatasnya sumber daya aparatur dan sarana sedikit banyak akan mempengaruhi jalannya roda Pemerintahan yang selama ini menjadi tumpuan untuk mewujudkan kinerja yang bisa berpengaruh dalam penyelenggaraan birokrasi.

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan – kebijakan dan program – program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah kebijakan, yaitu ketentuan – ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi.

Penjabaran selanjutnya adalah berupa program yaitu kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator sasaran yang akan ditetapkan. Atas dasar arti dan makna strategi tersebut dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang 5 (lima) Tahun kedepan (2018 – 2023) ditetapkan strategi berupa kebijakan umum, untuk selanjutnya taraget sasaran dan tujuan bisa kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Target Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TAHUN DASAR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan ketenteraman dan Ketertibn Umum		Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	80.1	76	83,6	82,63	83	83,5
	Mingkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Presentase Penegakan Perda / Perkada	100%	100%	100%	85%	85%	85%
		Presentase Penanganan Kebakaran Sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan : 1. Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	100%	94,59%	100%	35%	40%	75%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dengan Bupati Lumajang dengan capaian kinerja sebagai berikut :

A.2 Capaian Kinerja Tujuan

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tujuan (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN	KET
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83	77,88	94	Penilaian dari bagian organisasi

A.3 Capaian Kinerja Sasaran:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam		Indek Kepuasan Masyarakat Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	83	77,88	94	Sisa capaian kinerja pada triwulan berikutnya
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakan Perda/Perkada	85%	82,79%	97,4	Sisa capaian kinerja pada triwulan berikutnya
		Perentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan: Tingkat Waktu Tanggap 15 Menit	75%	85,7%	114,28%	

Keterangan:**Indikator I**

Persentase Penegakan Perda/Perkada, formulasi penghitungannya adalah:

$$\frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan pada tahun N}}{\text{Jumlah seluruh kasus pelanggaran Perda/Perkada pada tahun N}} \times 100\%$$

Untuk menghitung/menjabarkan formulasi indikator diatas dasar penghitungannya adalah diambil dari data pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2023. Adapun data pelanggaran dimaksud pada tabel data pelanggaran Perda/Perkada berikut ini:

Tabel 3.3
Data Pelanggaran Perda/Perkada
Triwulan II Tahun 2023

No	Jenis Penertiban	Nomor Perda dan Perkada	Penertiban	
			Jumlah Kegiatan Penertiban	Jumlah Pelanggaran
1	Penyelenggaraan Jalan	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2015 - Penyelenggaraan Jalan	1	1
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 08 Tahun 2012 - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1	1
3	Perda Lumajang Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1981 Tentang Pajak Pemotongan Hewan	Peraturan Daerah Lumajang Nomor 12 Tahun 1981 T - Pajak Pemotongan Hewan	1	1
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 13 Tahun 1995 - Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Nomor 3 Tahun 1974 tentang Memajukan Ketertiban Umum, Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Daerah	360	11
5	Menara Telekomunikasi	Peraturan Daerah kabupaten Lumajang No 6 Tahun 2020 - Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara Telekomunikasi	5	13
6	Penertiban dan pembinaan Pedagang kaki Lima (PKL)	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang	360	159
7	Restribusi Ijin mendirikan bangunan	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 08 Tahun 2006 - Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang	1	1
8	tambang ilegal	Perda no 18 Tahun 2006 - surat ijin pertambangan daerah	1	1
9	Pengendalian pencemaran lingkungan di kabupaten Lumajang	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2009 - Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Lumajang	1	1
10	Pajak mineral batuan dan logam	Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2017 - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1	1

11	Penyelenggaraan Reklame	Peraturan bupati Lumajang No.54 Tahun 2016 - Penyelenggaraan Reklame	36	604
12	Tempat Penimbunan (Stockpile) Terpadu	Peratura Bupati Lumajang No.40 Tahun 2022 - Tempat penimbunan pasir (stokcpile) terpadu	180	1
13	Operasi rokok ilegal	Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai	15	48
	Total Pelanggaran			843

Dari table di atas maka Persentase Penegakan Perda/Perkada adalah:

$$= \frac{698 \text{ kasus pelanggaran yang diselesaikan sampai Triwulan II Tahun 2023}}{843 \text{ kasus pelanggaran sampai Triwulan ITahun 2023}} \times 100\%$$

$$= 97,4\%$$

Analisa capain kinerja:

Jumlah pelanggaran pada triwulan II Tahun 2023 sebanyak 843 pelanggaran dengan kasus pelanggaran yang diselesaikan 698 kasus sehingga presentase Penegakan Perda/Perkada pada triwulan II Tahun 2023 sebesar 82,79 %, capaian kinerja sebesar 95 %

Adapun penyebab tingginya kasus pelanggaran yaitu

1. Minimnya pemamahaman masyarakat terkait Perda/Perkada
2. Minimnya sarana dan prasarana dalam kegiatan penegakan perda/perkada
3. Minimnya jumlah SDM dalam kegiatan penegakan perda/perkada
4. Minimnya pemahaman masyarakat terkait perda/perkada

Indikator II

Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) perhitungan formulanya adalah

$$\frac{\text{Jumlah Kebakaran yang ditangani sesuai Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate pada tahun N)}}{\text{Jumlah seluruh Kebakaran pada tahun N}} \times 100$$

Penjelasan :

Tingkat Waktu tanggap (*Respon Time Rate*) 15 Menit/Permendagri No. 114 Tahun 2018 Tentang Standart Tekhnis Pelayanan Dasar Pada Standart Peleyanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yang dimaksud adalah dari menerima pengaduan kejadian kebakaran sampai petugas pemadam tiba di Tempat Kejadian Kebakaran (TKB) waktunya 15 menit, untuk selanjutnya data response time rate s/d Triwulan II Tahun 2023 bisa kita lihat pada table berikut ini:

Tabel. 3.4
Data Penanganan Penanggulangan bencana Kebakaran
Triwulan I Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Kebakaran	Response Time	Tidak Respon Time
1	Januari	3	2	1
2	Februari	2	1	1
3	Maret	6	6	0
4	April	1	1	0
5	Mei	7	6	1
6	Juni	9	8	1
	Jumlah	28	24	4

Dari tabel diatas Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) bisa dihitung sebagai berikut:

$$= \frac{24 \text{ kejadian kebakaran yang sesuai respon time} \times 100\%}{28 \text{ kejadian kebakaran}}$$

$$= 85,71 \%$$

Dari perhitungan diatas realisasi Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) pemadam kebakaran adalah 85,71%, sedangkan target tahun 2023 adalah 75 %, jadi capaian kinerja pada triwulan II sebesar 114,28 %.

Adapun penyebab terjadinya tidak tercapainya respon time rate penanganan kebakaran disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Belum terbentuknya Wilayah Manajemen Kebakaran (MWK)
2. Belum terbentuknya relawan terhadap penanganan kebakaran
3. Kurangnya jumlah personil
4. Minimnya sarana dan prasarana

Tabel 3.5
Pemenuhan Capaian Sasaran Dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Penurunan Pelanggaran Masyarakat atas Perda dan/atau Perkada	117,60 %	87,88 %	61,43 %			17,27 %	24,57 %	37,63 %			14,69 %	27,96 %	61,26 %		
		Presentase Pelanggaran Masyarakat yang di Tindakanjuti oleh Linmas	60%	68,75 %	73%			100%	100%	100%			166,67 %	145,45 %	136,99 %		
		Persentase Penegakan Perda/Perkada				85%	85 %				83 %	20 %				98 %	81%
		Persentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) Penjelasan: Tingkat Waktu	25%	30%	35%	100 %	75 %	94,59 %	100%	100%	70 %	82 %	378,36 %	333,33 %	285,71 %	70 %	85,71 %

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Tanggap 15 Menit tanggap (Response time rate) Daerah Wilayah Menegemen Kebakaran (WMK) dalam kota 15 menit															

Tabel 3.6
Data Realisasi Sasaran Program dan Anggaran
Triwulan II Tahun 2023

No	Program	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023			Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023			Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
			4		5		6			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100	%	5.545.947.133	46,29	%	2.567.208.652	50%	46,29 %
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	10.657.462.963	31,91	%	3.400.341.300	100%	31,91%
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100	%	750.404.252	40,99	%	307.573.000	100%	40,99 %

B. REALISASI ANGGARAN

Berikut adalah program / kegiatan yang telah mendukung dalam pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja, sebagai berikut :

B.1 Realisasi Anggaran Tahun 2023 Triwulan II:

Tabel 3.7
Data Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 Pada		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	4	4		5		6	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100%	5.545.947.133	50%	2.567.208.652	50%	46,29%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	13.736.000	50%	720.000	29%	5,20%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	12.140.000	1 dokumen	-	50%	50%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	1.596.000	1 laporan	720.000	20%	45,11%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.151.810.008	21%	1.963.330.864	50%	47,29 %

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 Pada		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
			4		5		6	
1	2	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 orang/12 bulan	4.081.650.008	35/6 orang/bulan	1.937.210.864	50%	47,46%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	65.776.000	6 dokumen	26.120.000	50%	39,71 %
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	4.704.000	6 dokumen	990.000	50%	21,05%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	2.600.000	0 laporan	-	0 laporan	0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 laporan	1.784.000	8 laporan	-	44,44%	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase fasilitas Administrasi Umum PD	100 %	174.532.719	50%	103.462.100	50%	59,28 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 paket	10.520.469	25 paket	10.324.500	100%	98,14 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	81.479.040	4 paket	81.026.700	100%	99,44%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 laporan	10.367.210	1 laporan	5.466.500	50%	52,73 %

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 Pada		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
1	2	4	4		5		6	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	72.166.000	6 laporan	6.644.400	50%	9,21%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100 %	623.910.000	50%	292.388.294	50%	46,86 %
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 laporan	240.000	6 laporan	52.000	50%	21,67 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	116.850.000	6 laporan	41.518.974	50%	35,53 %
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	506.820.000	6 laporan	250.817.320	50%	49,49 %
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100 %	581.958.406	50%	207.307.394	50%	35,62 %
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 unit	557.858.406	33 unit	196.407.394	100%	35,21 %
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 unit	24.100.000	5 unit	10.900.000	100% unit	45,23%
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	10.657.462.963	100%	3.400.341.300	100%	31,91 %

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 Pada		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
			4		5		6	
1	2	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	5.527.628.144	100%	1.842.306.000	100 %	33,33%
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	365 kasus	429.456.000	183 kasus	204.000.000	50,13%	47,50 %
	Penindakan atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang dilakukan penindakan	476 kasus	3.193.585.644	238 kasus	671.314.000	50%	21,02 %
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	12 dokumen	518.225.000	6 dokumen	293.288.000	50%	56,59 %
	Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat Dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 dokumen	110.180.500	6 dokumen	6.850.000	50%	6,22 %

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 Pada		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
1	2	4	4		5		6	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 orang	204.931.000	40 orang	127.154.000	100%	62,05%
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam tehnik pencegahan kejahatan	12 dokumen	1.057.500.000	6 dokumen	539.700.000	50%	51,04%
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 dokumen	13.750.000	0	-	0	0%
	Penegakan Perda Kabupaten /Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah/Peraturan Bupati Yang Ditegakkan	18 %	5.129.834.819	12%	1.558.035.300	12%	30,37 %
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati /Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku usaha	12 laporan	2.488.140.366	6 laporan	805.072.000	50%	32,36%
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12 laporan	50.034.000	6 laporan	14.840.000	50%	29,66 %

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 Pada		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
1	2	4	4		5		6	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12 laporan	2.591.660.453	6 laporan	738.123.300	50%	28,48 %
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan Penanggulangan ,Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di Wilayah Kabupaten	100 %	750.404.252	100%	307.573.000	100%	40,99 %
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/kota	Persentase Penanganan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	100 %	694.330.995	100%	307.573.000	100%	44,30 %
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	503.313.000	6 laporan	218.957.000	50%	43,50 %
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	4 unit	86.826.025	1 unit	5.184.000	20%	5,97%

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Sasaran Perangkat Daerah / Program (<i>outcome</i>) / Kegiatan (<i>output</i>) / Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023 Pada		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan II Tahun 2023	
			4		5		6	
1	2	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	40 orang	104.191.970	40 orang	83.432.000	100%	80,08%
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	25.842.357	0 orang	0	0 %	0%
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	20 desa/kelurahan	25.842.357	0%	0	0%	0%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Persentase Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	100 %	30.230.900	100%	-	100%	0%
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan operasi penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	12 laporan	30.230.900	6 laporan	-	50%	0%

Tabel.38
Perbandingan Kinerja Tahun Sebelumnya
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum													
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota DAU	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100 %	6.001.101.418					100%	5.871.515.461				
	Perencanaan ,Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan ,Penganggar an dan Evaluasi Kinerja	100%	6.646.500					100%	6.646.500				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Jenis	3.280.500					3 Jenis	3.280.500				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip	3 Dok	3.366.000					3 Dok	3.366.000				
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>100%</i>	<i>4.103.565.053</i>					<i>100%</i>	<i>4.081.927.027</i>				
	Penyedia Gaji dan	Jumlah ASN terlayani	48 orang	4.039.627.561					48 orang	4.017.990.535				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan												
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Fasilitas Penatausahaan dan Verifikasi Keuangan SKPD	3 orang	53.830.492					3 orang	53.830.492				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	6 Jenis	2.232.000					6 jenis	2.232.000				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	18 Dok	7.875.000					18 Jenis Dok	7.874.000				
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Kepegawaian PD	100%	283.304.000					100%	183.679.310				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang diadakan	460 stel	280.324.000					230 stel	180.699.310				
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Terdata dalam Pengolaahan Administrasi Kepegawaian	100%	2.980.000					100%	2.980.000				
	Administrasi Umum Perangkat	Persentase Fasilitas Administrasi	100%	261.909.200					100%	261.573.305				

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Daerah	Umum PD												
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang disediakan	25 Jenis	16.070.890					25 jenis	16.070.890				
	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor Yang disediakan	76 Jenis	141.298.050					76 jenis	141.015.570				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Jenis Barang Yang disediakan	10 unit	54.171.260					10 unit	54.170.600				
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang disediakan	5 Jenis	3.600.000					5 jenis	3.600.000				
	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Fasilitas Rakor SKPD	100 kali	46.769.000					45 kali	46.716.245				
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Fasilitas Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	300.062.555					100%	294.996.650				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Mebel Yang Disediakan	16 Jenis	224.255.570					16 jenis	223.943.500				
		Jumlah Jenis Perlengkap an Kantor Yang	30 Jenis						35 jenis	-				

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Disediakan												
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Gedung Kantor / Bangunan lain yang dibangun	1 Jenis	75.806.985					1 jenis	71.053.150				
	Penyediaan Barang dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor	100%	475.888.080					100%	473.096.008				
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah Fasilitas Jasa Surat Menyurat	10.000 lembar	13.356.000					9817 Lembar	13.356.000				
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayar	48 rekeni ng	66.562.080					48 Rek	65.071.458				
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Fasilitas Jasa Pelayanan Umum Kantor	180 orang	395.970.000					178 orang	394.668.550				
		Jumlah Fasilitas Kebersihan Kantor	2 orang						2 orang	-				
	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Pemeliharaa n BMD	100%	569.726.030					100%	569.596.661				
	Penyedia Jasa Pemeliharaa n, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	54 unit	516.325.500					31 Unit	516.320.161				

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	/ Lapangan yang dipelihara												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara	50 jenis	25.800.000					44 jenis	25.800.000				
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Yang dipelihara	3 unit	27.600.530					2 -	27.476.500				
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Persentase peningkatan Penyelenggar aan Kententrama n dan Ketertiban umum	80%	5.861.594.000					80,33 %	5.828.379.350				
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	2.Persentase Penanganan Gangguan Ketentrama n dan Ketertiban Umum	100%	5.438.949.000					100%	5.408.694.000				

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	3. Jumlah Patroli dan Penertiban Ketentraman dan Ketertiban Umum	70 kali	340.425.000					335 kali	340.358.000				
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase Penindakan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	35%	1.935.950.000					46%	1.911.444.000				
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	1.1). Jumlah Saran Wilayah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	205 Des/kel	288.021.250					205 Des/kel	287.588.000				

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						
			2021		2022		2023		2021		2022		2023		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		2).Jumlah Anggota Linmas Yang dibina	471 anggota							700 anggota	-				
	Pemberdaya an Perlindunga n Masyarakat Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	2).Persentase Kelompok Siskamling Yang Aktif	25%	21.862.500						25%	21.600.500				
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindunga n Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	3.1).Jumlah SDM Satpol PP yang Dibina	170 orang	14.645.000						170 orang	14.645.000				
		2).Jumlah Anggota Satlinmas Yang Dibina	10 orang							10 orang	-				
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman	Jumlah Lembaga dan Kementrian Yang Menjalin Kerjasama	5 lembaga	2.838.045.250						5 lembaga	2.833.058.500				

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Ketertiban Umum													
	Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan	100%	422.645.000					100%	419.685.350				
	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Yang disosialisasi kan	12 Perda / Perbub	179.417.000					12 Perda / Perbub	179.327.000				
	Pengawasan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Peraturan Daerah Yang Diawasi	568 Perda / Perbub	46.394.750					568 Perda / Perbub	45.966.750				
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda / Perkada yang tertangani	20 kasus	196.833.250					112 kasus	194.391.600				
3	Program Pencegahan, Penanggulan gan, Penyela matan Kebakaran dan Penyelamata n Non Kebakaran	Persentase Penanganan, Penanggulan gan, Penyela matan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupten	100%	605.946.860					100%	605.116.500				

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Penanganan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Kebakaran Dalam Daerah	50%	602.246.860					100%	601.516.500				
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Oleh Bidang Pemadam Kebakaran	36 kali	523.528.000					49 kali	523.359.000				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana Pemadam Kebakaran yang disediakan	10 unit	78.718.860					12 unit	78.157.500				
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	60 kali	3.700.000					114 kali	3.600.000				
	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang didata	60 unit	3.700.000										

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						16.953.814.348							6.275.122.952
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota DAU	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran			100%	5.255.247.102	100%	5.545.947.133			100%	5.096.432.399	50%	2.567.208.652
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja			100%	1.754.000	100%	13.736.000			100%	1.742.000	50%	720.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 dokumen	884.000	3 dokumen	12.140.000			3 dokumen	884.000	2 dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			5 laporan	870.000	5 laporan	1.596.000			5 laporan	858.000	2 laporan	720.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Keuangan			100%	4.116.109.613	100%	4.151.810.008			100%	3.961.590.351	21 %	772.456.284

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		<i>Perangkat Daerah</i>												
	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			12 orang/bulan	4.076.765.613	12 orang/bulan	4.081.650.008			12 orang/bulan	3.922.327.351	35 orang/6 bulan	1.937.210.864
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			12 dokumen	35.309.000	12 dokumen	65.776.000			12 dokumen	35.228.000	6 dokumen	26.120.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-	-	-	-			-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5 laporan	2.175.000	5 laporan	2.600.000			5 laporan	2.175.000	3 laporan	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi			18 laporan	1.860.000	18 laporan	1.784.000			18 laporan	1.860.000	9 laporan	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum PD			100%	155.820.259	100%	174.532.719			100%	153.612.400	60%	103.462.100
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			25 paket	7.067.280	1 paket	10.520.469			25 paket	7.067.280	1 paket	10.324.500
	Penyedia Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 paket	42.587.259	4 paket	81.479.040			4 paket	40.569.030	4 paket	81.026.700
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			2 paket	11.996.820	2 paket	10.367.210			2 paket	11.958.700	1 paket	5.466.500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			45 laporan	44.230.000	45 laporan	72.166.000			45 laporan	44.215.990	6 laporan	6.644.400
	Pengadaan Peralatan				50 unit	49.938.900					50 unit	49.801.400		

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan mesin lainnya													
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Kantor			100%	600.346.000	100%	623.910.000			100 %	596.533.805	46,86 %	292.388.294
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat					12 lapora n	240.000					6 lapora n	52.000
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 lapora n	108.850.000	12 lapora n	116.850.000			12 laporan	105.613.937	6 lapora n	41.518.974
	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 lapora n	491.496.000	12 lapora n	506.820.000			12 laporan	490.919.868	6 lapora n	250.817.320
	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Fasilitas Pemeliharaa n BMD			100%	381.217.230	100%	581.958.406			100%	381.009.254	50%	207.307.394
	Penyedia Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perijinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara			33 unit	368.817.230	33 unit	557.858.406			33 unit	368.614.254	33 unit unit	196.407.394

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Dinas Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			5 unit	12.400.000	5 unit	24.100.000			5 unit	12.395.000	5 unit	10.900.000
2	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Persentase peningkatan Penyelenggaraan Kententraman dan Ketertiban umum			85%	6.907.199.574	85%	10.657.462.963			83%	6.604.055.062%	3.400.341.300
	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	2.Persentase Penanganan Gangguan Kententraman dan Ketertiban Umum			100 %	4.127.564.000	100%	5.527.628.144			100 %	4.127.046.000	100%	1.842.306.000
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,Pengamanan,dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan			365 kasus	1.693.240.000	365 kasus	429.456.000			365 kasus	1.693.200.000	183 kasus	204.000.000

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		, dan Pengawasan												
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenterama n dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan			476 kasus	1.179.000.000	476 kasus	3.193.585.644			476 kasus	1.179.000.000	238 kasus	671.314.000
	Koordinasi Penyelenggar aan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggar aan Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota			12 dokum en	313.300.000	12 dokum en	518.225.000			12 dokume n	313.300.000	6 dokum en	293.288.000

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemberdaya an Perlindunga n Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdaya an Perlindunga n Masyarakat dalam rangka Ketenterama n dan Ketertiban Umum					12 dokum en	110.180.500					6 dokum en	6.850.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindunga n Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindunga n Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya					40 orang	204.931.000					40 orang	127.154.000
	Kerjasama Antar Lembaga dan Kementrian Dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan			12 dokum en	942.024.000	12 dokum en	1.057.500.000			12 dokume n	941.546.000	6 dokum en	539.700.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	dan Ketertiban Umum	Kejahatan												
	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani					13.750.000					30	-	
	Penegakan Perda Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	Persentase Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang ditegakkan			100%	2.779.635.574	100%	5.129.834.819			100%	2.477.009.062	100%	1.558.035.300
	Sosialisasi Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha			12 laporan	1.328.381.500	12 laporan	2.488.140.366			12 laporan	1.097.573.862	6 laporan	805.072.000
	Pengawasan Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan			12 laporan	44.800.000	12 laporan	50.034.000			12 laporan	44.800.000	6 laporan	14.840.000

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota												
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP			12 laporan	1.406.454.074	12 laporan	2.591.660.453			12 laporan	1.334.635.200	6 laporan	738.123.300
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Penanganan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran di wilayah Kabupten			100%	540.831.530	100%	750.404.252			100%	539.723.888	100%	307.573.000
	Pencegahan, Pengendalian Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Penanganan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Daerah			100%	540.831.530	100%	694.330.995			104%	539.723.888	100%	307.573.000

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota			12 laporan	469.655.000	12 laporan	503.313.000			12 laporan	469.636.888	6 laporan	218.957.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait			4 unit	71.176.530	4 unit	86.826.025			4 unit	70.087.000	1 unit	5.184.000
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			40 orang		40 orang	104.191.970				-	40 orang	83.432.000

No	Program/Ke giatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemberdaya an Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Prosentase Pemberdaya an Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			100%		100%	25.842.357						-
	Pembentuk an dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)	Jumlah Desa/Kelura han yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) setiap tahunnya			20 orang		20 orang	25.842.357					-	-
	Penyelenggar aan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia	Persentase Penyelenggar aan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahaya kan Manusia			100%		100%	30230900					%	-
	Penyelenggar aan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahaya kan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil penyelenggar aan operasi penyelamata n yang mengancam keselamatan manusia					12 lapora n	30230900					6 lapora n	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
			2021		2022		2023		2021		2022		2023	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	(SATUAN POLISI PAMONG PRAJA)													

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Satuan Polisi pamong Praja Triwulan II Tahun 2023 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut :

1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan target sebesar 83 , dan realisasi sebesar 77,88/capaian kinerja sebesar 94%
2. Capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja triwulan II Tahun 2023 terdiri atas 1 sasaran yakni ***Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat***. Dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yakni:
 - a. Persentase Penegakan Perda/Perkada dengan target 85% dan realisasi sebesar 82,79 %/ capaian kinerja sebesar 97,4%.
 - b. Prsentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK) dengan target sebesar 75% sedangkan realisasinya sebesar 85,7% /capaian kinerja sebesar 114,28%
3. Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada Triwulan II menunjukkan keberhasilan.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam upaya menindaklanjuti indikator yang masih dipandang kurang berhasil upaya yang dilakukan oleh OPD Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kembali indikator dan target pada sasaran OPD Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang di dalam Matrik Renstra OPD tahun 2018-2023 yang nantinya dijadikan sebagai bahan reuiu Rentra OPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang

2. Mengoptimalkan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat terhadap produk Hukum Daerah
3. Meningkatkan Kerjasama dengan Lembaga terkait peningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4. Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya bencana kebakaran dengan cara memberikan penyuluhan/edukasi kepada masyarakat/badan usaha dalam hal pencegahan sedini mungkin terjadinya bencana kebakaran.

Demikian laporan kinerja ini disampaikan sebagai bahan evaluasi pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang pada Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Lumajang, 30 Juni 2023

Pt. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



SUNARDI, MP.

NIP. 19651201 198903 1 012